

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Y. (2013). *Saat Menuai Kejahatan*. PT Refika Aditama.
- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum* (2 ed.). PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Ahmad Asra, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Azhar, M. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan*.
- Darwin Pane, M. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Logos Publishing.
- Diab, A. (2014). Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur) . *Al - 'Adl*, 7(2), 53–66.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi, dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Farhan. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Sinar Grafika.
- Erdianto, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*.
- Hamzah, A. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking*. Cv Social Politic Genius.
- Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). *MASALAH IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISTIK PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN BARAT (Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan)*. 333–352.
- Laily, S. Z. N., & Subekti. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah). *Jurnal Recidive*, 8(1), 21–32.
- Mahrus, H. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (1 ed.). Rajawali Pers.

- Marlina, & Zulliah, A. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Refika Aditama.
- Nuraeny, H. (2013). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Sinar Grafika.
- Pidana, T., Orang, P., Marcelino, O., Judas, A., & Elias, R. F. (2022). *M.Zaelani Tammaka, 2003, Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus*.
- Prasetyo, T. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia (Y. Sri Hayati (ed.); 2 ed.)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Permatasari, G., Sawitri, H. W., & Maryono, A. S. (2019). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu) Implementation Of Granting Restitution To The Victims Criminal Act Of People-Trafficking (Case Study At The Proccesor's Office Of . *Soedirman Law Review, 1(1)*, 52–65.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (1 ed.). Aksara Baru.
- Saleh, R. (2017). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (1 ed.). Ghalia Indonesia.
- Sadjijono. (2006). *Etika Profesi Kepolisian-Suatu Telaah Filosofis : Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*. Penerbit Alfina Primatama.
- Sinlaelol, P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Cita Intrans Selaras.
- Soedarto. (1981). , *Suatu Pebaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. Alumni.
- Sunarso, S. (2020). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Tarmizi & Suryani (ed.); 3 ed.). Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdullah, D. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan di

- Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Dalam Al’Adl, Vol. IX*,(No. 2,), Hlm. 240.
- Ahmad Asra, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339.
- Basuki, U. (2017). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum, 13.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi, dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, B. S. (2017). Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok. *Jurnal Law Pro Justitia*, II(2), 65.
- Kasih Kalpika, D. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 836–845.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 235.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Puanandini, D. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 257–270. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesia Journal of Law and*

Social-Political Governance, 3(1), 231–243.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>

Rorong, O. (2017). Peran Penyidik Polri Dalam Pelimpahan Berkas Perkara Pada Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. *Lex Crimen*, VI(4), 45–53.

Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107–120.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>

Wira Pratama, M. I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(2), 59–73.
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)

Wulandari, S. (2018). Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(16), 17–28.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja;
7. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
10. PP No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

D. Sumber Lain

UNDOC. 2012. "What Is Human Trafficking?"

<http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.htm>.